

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Capra (1998) memasuki milinium ketiga, manusia berada dalam suatu proses pencarian keselarasan raga-batin dalam kancan pergaulan dengan teknologi modern pada peradaban benda yang tak terelakan. Perkembangan teknologi menantang manusia untuk semakin berfikir kritis, mendesak manusia untuk memanfaatkan waktu dan tenaganya seefisien dan seefektif mungkin. Proses modernisasi ini akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia.

Perubahan yang cepat terjadi di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, politik, sosial dan informasi serta komunikasi maupun perdagangan dan sebagainya. Perubahan tersebut bukan hanya berimplikasi pada tuntutan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tuntutan mutu hidup, perubahan tuntutan mutu pelayanan kesehatan, perubahan tuntutan mutu pendidikan dan sebagainya.

Pada gilirannya, perubahan tersebut menuntut pula peningkatan mutu sumberdaya manusia untuk mengimbangi pesatnya perubahan-perubahan di atas. Jika mutu sumberdaya manusia Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang memadai niscaya kehidupan umum masyarakat akan kurang menggembirakan

dan akan terpuruk dalam persaingan global. Kegagalan sumberdaya manusia Indonesia dalam persaingan global, akan menyebabkan mutu kehidupan masyarakat secara umum akan menurun.

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengubah perilaku manusia, serta merupakan ujung tombak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan jurnal pendidikan (2001) dari 10 negara ASEAN mutu pendidikan di Indonesia menduduki peringkat ke-9. Hal ini menunjukkan betapa masih rendahnya mutu pendidikan di tanah air.

Diantara lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional merupakan salah satu tumpuan utama untuk pemenuhan dan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia, Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor (No) 0296/U/1996 yang telah disosialisaikan ke sekolah-sekolah sejak sekitar tahun 1997. Sasaran Keputusan Mendikbud ini adalah Kepala sekolah. Kepala sekolah mendapatkan perhatian khusus dari Mendikbud, karena kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah yang mendapat fasilitas sumber daya dana cukup memadai dari pemerintah berupa tunjangan kepala sekolah. Tidak ada satu faktorpun yang lebih banyak bermanfaat terhadap sebuah organisasi daripada kepemimpinan yang efektif. Pemimpin diperlukan untuk menentukan tujuan, mengalokasikan

sekolah, mengkoordinasikan perubahan, membina kontak antar pribadi dengan pengikutnya, menetapkan arah yang benar atau yang paling baik bila kegagalan terjadi (Gibson dkk, 1996).

Sebelum SK Mendikbud No. 0296 / U / 1996 diberlakukan, masa tugas kepala sekolah negeri adalah sejak seorang guru diangkat sebagai kepala sekolah sampai pensiun atau meninggal dunia atau mutasi tugas. Mutasi kepala sekolah dilakukan jika ada kepala sekolah yang meninggal dunia atau pindah tugas. Kondisi ini memungkinkan kepala sekolah kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sebab jika seorang guru yang telah menduduki jabatan kepala sekolah, kedudukan tersebut tidak akan tergeser meskipun tidak dapat menunjukkan profesionalitas untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini akan berdampak negatif terhadap kemajuan sekolah yang dipimpinnya.

Suatu kenyataan yang dialami penulis sebelum menjadi kepala sekolah. Pada saat itu kepala sekolah menderita sakit lumpuh, sehingga tidak dapat datang kesekolah untuk menjalankan tugasnya. Pelaksanaan tugas dilakukan kepala sekolah di rumah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah diputuskan oleh kepala sekolah di rumahnya. Setiap guru dan staf administrasi yang berkepentingan dengan kepala sekolah harus kerumahnya. Bahkan rapat dewan guru dilakukan di kamar kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tidak dapat memberhentikan kepala sekolah tersebut, karena tidak ada alasan yang kuat untuk itu. Jabatan kepala sekolah pada waktu itu adalah

... ..

diperiodesasikan dan tidak wajib mengajar. Kondisi ini menjadikan sekolah kurang terkordinasi, setiap guru dan bagian administarsi berjalan menurut mereka masing-masing yang berjalan hingga sampai kepala sekolah tersebut pensiun dari pegawai negeri sipil. Tentunya hal ini sangat merugikan sekolah.

SK Mendikbud No. 0296/U/1996 tentang penugasan guru pegawai negeri sebagai kepala sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa jabatan kepala sekolah adalah tugas tambahan disamping tugas pokok sebagai guru. Selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, masa tugas kepala sekolah negeri diberikan untuk masa tugas selama 4 tahun. Namun demikian, masa tugas tersebut dapat diperpanjang menjadi 2 masa tugas (8 tahun) jika yang bersangkutan berprestasi, tetapi dapat pula masa tugasnya tidak sampai habis jika prestasi yang bersangkutan dinilai kurang baik atau yang bersangkutan bermasalah.

Kiranya SK Mendikbud tersebut mudah dipahami dalam rangka peningkatan mutu sekolah melalui upaya peningkatan kinerja kepala sekolah mengingat kepala sekolah mempunyai peran sentral di sekolah. Hal ini berarti, bahwa setelah diberlakukannya SK Mendikbud No. 0296/U/1996, seorang guru yang menduduki jabatan kepala sekolah, maka kedudukan tersebut akan tergeser jika tidak dapat menunjukkan profesionalitas untuk meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya jika seorang guru yang menduduki jabatan kepala sekolah tersebut mampu menunjukkan profesionalitasnya, maka kedudukan tersebut tidak akan

mudah tergeser. Dengan demikian akan berdampak positif terhadap kemajuan sekolah yang dipimpinnya.

Dikaitkan dengan teori motivasi, maka terbitnya SK Mendikbud tersebut merupakan motivator ekstrinsik yang diharapkan mampu mendorong semangat dan kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah yang berprestasi bukan hanya memberikan manfaat bagi warga sekolah, masyarakat, bangsa dan negara akan tetapi juga berpeluang untuk mendapatkan *reward* dari yang berwenang berupa tugas tambahan kepala sekolah sampai 3 masa tugas. Di pihak lain, kepala sekolah mempunyai sikap tersendiri terhadap SK Mendikbud tersebut. Sikap kepala sekolah ini sangat berkait erat dengan keberhasilan implementasi SK Mendikbud tersebut karena baik langsung maupun tidak langsung kepala sekolah akan memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, menolak atau menerima.

Diantara jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan bagian dari Pendidikan Menengah. Personalia sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Mutu pendidikan SMP ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah kualitas input, kelengkapan sarana / prasarana pendidikan, kinerja guru beserta karyawan, kualitas lingkungan dan yang tak kalah pentingnya adalah kinerja kepala sekolah.

Hal ini berarti, kepala sekolah perlu senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan kreativitasnya agar dapat melaksanakan tugas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari terbitnya SK Mendikbud ini adalah optimalisasi peran kepala sekolah sehingga mutu sekolah dapat selalu dipertahankan dan ditingkatkan.

Persolannya adalah, apakah secara empirik sekolah mendapatkan nilai tambah dari implementasi SK Mendikbud tersebut ?. Bagaimana sikap dan kinerja kepala sekolah negeri selama diberlakukannya SK Mendikbud tersebut kiranya dapat digunakan sebagai refleksi apakah tujuan pemberlakuan SK Mendikbud tersebut memberikan nilai tambah bagi sekolah atau justru kontra produktif ?

Sejak SK Mendikbud No 0296/U/1996 ini ditetapkan dan dilaksanakan, hingga kini tampaknya belum banyak yang melakukan penelitian tentang pengaruh sikap atas SK Mendikbud No. 0296/U/1996 terhadap kinerja kepala sekolah negeri. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut melalui studi kasus di Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sikap kepala sekolah negeri atas SK Mendikbud No. 0296/U/1996 baik?
2. Apakah sikap kepala sekolah negeri atas SK Mendikbud No.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji sikap kepala sekolah negeri atas SK Mendikbud No. 0296/U/1996?
2. Menguji pengaruh sikap kepala sekolah negeri atas SK Mendikbud No. 0296/U/1996 terhadap kinerjanya?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh sikap terhadap kinerja.

2. Manfaat bagi instansi

a. Memberikan masukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang sikap kepala sekolah negeri terhadap SK Mendikbud No. 0296/U/1996.

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai pelengkap bahan pertimbangan rekrutmen / pengangkatan kepala sekolah negeri di Kabupaten Gunungkidul.

3. Manfaat bagi teman sejawat.

- a. Menambah pengetahuan teman sejawat (kepala sekolah negeri) di Kabupaten Gunungkidul
- b. Menjadi masukan / reverensi bagi guru calon kepala sekolah negeri di Kabupaten Gunungkidul